BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL

A. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan merupakan suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan.

Pada awalnya Weber terlebih dahulu memisahkan pengertian antara tindakan dan perilaku yang murni reaktif sebagai berikut:

> Mulai sekarang konsep perilaku dimaksudkan sebagai perilaku otomatis yang tidak melibatkan pemikiran. Stimulus datang dan perilaku terjadi, dengan sedikit saja jeda antara stimulus dan respon...ia memusatkan perhatiannya pada tindakan yang jelas-jelas melibatkan campur tangan pemikiran antara terjadinya stimulus dan respon. Secara agak berbeda, tindakan dikatakan terjadi ketika individu meletakkan makna subyektif pada tindakan mereka, bagi Weber, tugas analisis sosiologi terdiri dari "penafsiran tindakan menurut makna subyektif".[1]

Penjelasan diatas membawa pengertian bahwa tindakan sosial itu sendiri merupakan proses aktor terlibat dalam pengambilan-pengambilan keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dipilih, tindakan tersebut mengenai semua jenis perilaku manusia, yang dengan penuh arti diorientasikan kepada perilaku orang lain, yang telah lewat, yang sekarang dan yang diharapkan di waktu yang akan datang.

Teori tindakan sosial merupakan Sumbangan Max Weber untuk sosiologi adalah teorinya mengenai rasionalitas. Dimana rasionalitas merupakan konsep dasar yang Weber gunakan dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan

[1] George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, (Bantul: Kreasi Wacana, 2010), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial. Tindakan rasional menurut Weber berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan. Penggunaan teori tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melihat bagaimana pentingnya bentuk kehidupan sosial ekonomi pasukan kuning tersebut.

Tindakan sosial adalah semua tindakan manusia yang berkaitan dengan sejauhmana individu yang bertindak itu memberinya suatu makna subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Dari sudut waktu, tindakan sosial dapat dibedakan menjadi tindakan yang diarahkan untuk waktu sekarang, masa lalu dan masa yang akan datang. Dari sudut sasaran tindakan sosial dapat berupa seseorang individu atau sekumpulan orang. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sosial. Pembedaan pokok yang diberikan adalah tindakan rasional dan non rasional.

Bagi Weber, dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena mereka memutuskan untuk melakukan sesuatu tersebut guna mencapai apa yang dikehendakinya, barulah kemudian mereka memilih tindakan.[2] Secara tidak sadar, masyarakat adalah hasil akhir dari interaksi manusia. Interaksi tersebut berasal dari tataran interakti individu (*micro*).

Tindakan rasional berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan bahwa tindakan itu dinyatakan.Atas dasar rasionalitas tindakan sosial,

[2] Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Weber membedakannya ke dalam empat tipe. Semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah pula dipahami. Empat tipe tindakan social tersebut antara lain: Rasionalitas instrumental, Rasionalitas berorientasi nilai, tindakan tradisonal dan tindakan afektif.

1. Rasional Instrumental (Zwerkrationalitat)

   Tindakan diarahkan apabila tujuan, alat dan akibatnya diperhitungkan dan dipertimbangkan secara rasional. Tindakan ini ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan perilaku manusia lain; harapan-harapan ini digunakan sebagai 'syarat' atau 'sarana' untuk mencapai tujuan-tujuan aktor lewat upaya dan perhitungan yang rasional".

2. Rasionalitas Nilai

   Tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku-perilaku etika, estetika, religius atau bentuk perilaku lain, yang terlepas dari prospek keberhasilannya.

3. Tindakan afektif

   Tindakan yang dibuat-buat. Dipengaruhi oleh perasaan emosi aktor.Tindakan ini sukar dipahami.[3]Aksi adalah afektif manakala faktor emosional menetapkan cara-cara dan tujan-tujuan daripada aksi. Tindakan ini sebagian besar dikuasi oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa.

4. Tindakan Tradisional

[3] Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma*, 41.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan yang dilakukan karena kebiasaan yang mendarah daging,[4] tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan.

Tindakan sosial murni ini diterapkan dalam suatu situasi dengan suatu pluralitas cara-cara dan tujuan-tujuan di mana si pelaku bebas memilih cara-caranya secara murni untuk keperluan efesiensi.[5] Teori Weber merupakan tindakan sosial, apapun wujudnya dapat dipahami secara subjektif dan pola motivasional yang berkaitan.Karena tidak selalu semua perilaku dapat dipahami sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk memahami subjektif dan motivasi individu perlu memahami dan berempati pada orang lain agar dapat menyimpulkan hal yang dilakukan orang lain. tindakan sosial yang memberikan pengaruh terhadap pola-pola hubungan yang terjadi dalam sosial masyarakat serta juga strukturnya yang menyangkut pola tersebut.[6]

1. Rasionalitas Max Weber

Rasionalitas manusia merupakan unsur pertama yang menyusun kesadaran selain kehendak bebas. Dengan rasionalitas inilah manusia nantinya dapat mengetahui dan memahami realitas yang terjadi di sekitarnya. Dengan rasionalitas, manusia menginjakkan satu kakinya di tanah kesadaran. Seperti

[4] George Ritzer and Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*,1 37.
[5] Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010). 273.
[6] Siahan dan Hotman, *Pengantar Ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: IKIP Erlangga, 2001). 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diungkapkan Aristoteles "rasio adalah bagian dari jiwa manusia yang memiliki kapasitas untuk memahami dan mengatur diri sendiri". Inti dari rasionalitas adalah argumen-argumen bagi pandangan atau pemikiran yang telah dihasilkan. Oleh karena itu, rasionalitas oleh para filsuf terutama Plato dan Aristoteles dipahami sebagai "sebuah kapasitas yang memiliki kemampuan membuat suatu putusan, sekaligus mengandung alasan-alasan atau dasar-dasar argumentasi bagi putusan yang tellah dibuat".

Sejalan dengan pendapat Aristoteles, kemudian Rene Descartes mendirikan aliran rasionalisme dan berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah.[7] Dengan akal, dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif, seperti yang dicontohkan dalam ilmu pasti. Dalam rasio terdapat ide-ide dengan begitu seseorang dapat membangun suatu ilmu pengetahuan tanpa menghiraukan realitas di luar rasio. Untuk memahaminya kita harus memperhatikan dua masalah utaman yang keduanya diwarisi dari Descartes. Pertama masalah substansi dan kedua masalah hubungan antara jiwa dan tubuh.

Rasionalitas memberi sentuhan khusus dalam bidang-bidang kebudayaan. Dalam konteks ini, rasionalitas yang terpenting adalah rasionalitas tindakan. Dalam konteks tindakan, rasionalitas adalah perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran-sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal

[7] Asmoro Akhmadi, *Filsafat Umum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sarana-sarana yang efisien dan mengacu kepada perumusan nilai-nilai tertinggi, yang mengarahkan tindkan dan orientasi-orientasi yang terencana demi pencapaian nilai tersebut.

Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam klasifikasinya mengenai tipe-tipe tindakan sisoal. Bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Bagi Weber, rasionalitas adalah perhitungan yang masuk akal untuk mencapai sasaran-sasaran berdasarkan pilihan-pilihan yang masuk akal, dengan sarana-sarana yang efisien, dan mengacu kepada perumusan nilai-nilai tertinggi, yang mengarahkan tindakan dan orientasi-orientasi yang terencana demi pencapaian nilai-nilai tersebut.

Karena kriteria rasionalitas merupakan suatu kerangka acuan Weber, maka masalah keunikan orientasi subyektif individu serta motivasinya dapat diatasi. Juga menurut perspektif ilmiah, kriteria rasionalitas merupakan suatu dasar yang logis dan obyektif untuk mendirikan suatu ilmu pengetahuan mengenai tindakan sosial serta institusi sosial dan sementara itu membantu menegakkan hubungannya dengan arti subyektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa rasionalitas adalah acuan utama Weber dalam identifikasi tindakan manusia, selanjutnya hal diatas membawa Weber mengimplementasikan sisi rasionalitas pada salah satu pemikirannya tentang tindakan sosial yang ada di masyarakat.

Kontekstualisasi antara teori dengan obyek yang diteliti nantinya peneliti akan mempertanyakan kembali mengenai latar belakang dan motivasi yang ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada benak subyek penelitian dalam mengambil tindakan ataupun keputusan dalam melakukan gerakan sosial dan kritikan-kritikan pedas terhadap pemerintahan demokrasi terpimpin Sukarno.

B. Konsep Penyadaran Menurut Paulo Freire

Bagian ini peneliti akan memaparkan pembagian tingkat kesadaran manusia oleh Paulo Freire, tingkat kesadaran yang akan berkaitan dengan pandangan manusia terhadap realitas dunia atau keadaan lingkungan di sekitarnya. Pandangan atau persepsi manusia terhadap dirinya dan lingkungan (alam realitas) akan berpengaruh secara singnifikan terhadap tindakan (perilaku) yang akan diambilnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut analisis Freire yang dikutip oleh Mansour Fakih bahwa ada tiga kesadaran yang menjadi turunan dari paradigma pendidikan. Tiga kesadaran tersebut adalah kesadaran *magis*, kesadaran naif, dan kesadaran kritis.[8]

Adapun penjelasan dari tingkat kesadaran menurut Paulo Freire tersebut adalah sebagai berikut:

1) Kesadaran *Magis*

Kesadaran *magis* (magical consciousness) adalah tingkat kesadaran manusia (masyarakat) yang tidak mampu melihat kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Semisal, masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Freire mengatakan bahwa:

[8] William F. O'neil, Ideologi-Ideologi Pendidikan, terj: Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. xvi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Orang yang berada pada tingkat kesadaran ini tidak bisa mengobyektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang sebetulnya mengandung permasalahan. Orang yang masih dalam tahap kesadaran ini kurang memiliki persepsi struktural, yang membentuk dan terus membentuk persepsi itu berdasarkan realitas nyata yang dipahaminya. Karena persepsi strukturalnya kurang, maka bagi mereka kenyataan adalah superrealitas atau sesuatu yang berada di luar kenyataan obyektif.[9]

Orang yang masih dalam tingkatan kesadaran pertama ini, masih terperangkap dalam "*mitos inferioritas alamiah*", sehingga mereka cenderung menggunakan cara-cara mistik untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapinya. Freire menyebut kesadaran pada tahap ini sebagai bentuk kesadaran *magis* yang dicirikan dengan fatalisme, menganggap hari ini biasa-biasa saja dan hari esok adalah bentuk pengulangan hari sekarang. Pandangan ini merupakan ciri dari keadaan orang yang sudah pasrah pada kenyataan, mereduksi masa depan sebagai suatu keadaan yang sudah pasti dan tidak bisa dirubah lagi.[10]

Pandangan seperti inilah yang menyebabkan manusia membisu, menceburkan diri kelembah kemustahilan untuk melawan kekuasaan dan ketidakadilan. Mereka yang berada pada tingkatan kesadaran *magis* akan menolak bahwa mereka memiliki masalah, mereka bahkan menghindari masalah dengan cara meletakkan masalah di waktu dan tempat yang lain. Seraya berkata "kami tidak menghadapi masalah-masalah ini, segalanya sudah sejak dari dulu berjalan seperti ini karena pemerintah atau penguasa tidak ingin melangkah lebih maju". Mereka menggantungkan nasibnya pada orang lain dan mengangap mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia

---

[9] Paulo Freire, *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*, terj: Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyartanto, Cet. VI, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hal. 135-136.
[10] Ibid., 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini adalah manusia yang sudah terpisah dari eksistensinya sebagai subyek aktif di dunia. seperti halnya yang dikatakan Freire yang dikutip oleh William A. Smith dalam bukunya yang berjudul *Concentizacao* Sebagai Tujuan Pendidikan Paulo Freire menyatakan bahwa:

> Orang-orang pada tingkat kesadaran semi-transitif (kesadaran magis) tidak dapat menangkap masalah-masalah di luar pengertian kebutuhan biologis. Perhatian mereka hampir seluruhnya terpusat pada cara bertahan hidup, dan mereka tidak memiliki *sense of life* dalam pengertian yang lebih historis....hanya dengan pengertian ini, kesadaran semitransitif bisa mengetahui bagaimana manusia terpisah dari eksistensinya.[11]

Keterpisahan atau alienasi dari eksistensi inilah yang menghalangi mereka untuk mengetahui fakta-fakta yang ada (tingkat kesehatan yang rendah, kemiskinan, penganguran) sebagai suatu masalah. Mereka berpikir hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali peluang untuk mengubah keadaan. Meskipun fakta-fakta tersebut bisa mengalami perubahan, tapi mereka hanya sekedar menjadi penonton plus. Kesadaran *magis* ini ditandai dengan dua orientasi dasar, yakni menyerahkan fakta-fakta pada penguasa untuk menjelaskan mengapa segalanya seperti ini dan pandanagan yang sederhana tentan hubungan kausalitas.

> Freire mengatakan bahwa, orang-orang tidak bisa membedakan antara persepsi mereka tentang obyek-obyek dari tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungannya, sehingga mereka terjatuh pada penjelasan *magis* karena mereka tidak bisa menangkap kausalitas yang sebenarnya.[12]

Pola berpikir orang yang berkesadaran *magis* ini menyerahkan segala sesuatu pada ketentuan superrealitas di luar dirinya, sehingga tindakan yang diambil adalah tindakan yang fatalistik. Mereka menggantungkan diri secara

---

[11] William A. Smith, *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire*, terj. Agung Prihantoro, Cet. II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 62.
[12] Ibid.,. 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total pada Tuhan, alam dan penindas, sehingga ketika terjadi suatu penyimpangan tindakan satu-satunya yang dianggap logis oleh mereka adalah penarikan diri dan menjauh dari keadaan, menyesuaikan dengan kehidupan yang ada, dan menunggu segalanya akan berubah dengan sendirinya. Kesadaran *magis* lebih melihat faktor di luar manusia (natural maupun supra natural) sebagai penyebab dari ketidakberdayaannya.

2) Kesadaran Naif

Perubahan dari kesadaran *magis* ke kesadaran naif adalah perubahan dari menyesuaikan diri dengan fakta-fakta kehidupan yang tidak terelakkan ke arah memperbaharui penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan individu-individu dalam sebuah sistem yang pada dasarnya keras. Mereka beranggapan bahwa, jika mereka bisa memperbaharui perilakunya, maka sistem tersebut akan berjalan dengan baik. Orang-orang pada dataran kesadaran ini menyederhanakan masalah dengan menimpakan individu-individu sebagai penyebab permasalahan itu sendiri bukan pada sistem yang melinkupinya.[13]

Kesadaran naif (*naival consciousness*) ini adalah tingkat kesadaran di mana manusia beranggapan bahwa dirinyalah sebagai sumber dari permasalahan itu sendiri atau dengan kata lain, aspek manusia menjadi akar permasalahan dalam masyarakat.[14] Orang-orang yang naif memandang sistem sebagai sesuatu yang ideal, sebagai penyedia dan sumber norma dan aturan

[13] William A. Smith, *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan...*, 62.
[14] Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B. Mangun Wijaya*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menata berputarnya roda sistem tersebut. Kaum tertindas menyalahkan dirinya karena tidak seperti kaum penindas atau tidak bisa memenuhi keinginan kaum penindas. Inilah yang oleh

Freire disebut dengan agresi horisontal dan penghakiman pada diri sendiri.[15] Sehingga ketika orang-orang telah memiliki persepsi teperti itu, maka jalan yang mereka ambil adalah melebur dengan para penindas, bekerjasama dan menjelma menjadi penindas baru. Orang-orang yang secara implisit menyalahkan diri sendiri atau orang tertentu atau kelompok tertindas merupakan bagian dari proses yang disebut oleh Freire dengan "pemberian makan kepada benalu penindas". Kaum tertindas menginternalisasikan kepercayaan-kepercayaan tersebut dan menjadikannya sebagai milik sendiri, sehingga secara tidak langsung individu-individu tertindas melanggengkan ideologi dan keyakinan kaum penindas.[16]

Berkali-kali orang-orang tertindas ini menunjuk diri mereka sebagai pihak ketiga yang menunjukkan bahwa mereka mengangap dirinya sebagai obyek yang dikenai perlakuan, bukannya subyek yang sanggup melakukan sesuatu. Mereka memandang negatif terhadap sesama kaum tertindas, tidak percaya pada kemampuan diri sendiri dan pada kawan-kawannya. Mereka beranggapan bahwa kesalahan bertumpu pada dirinya sendiri dan berkata "kami tidak tahu bagaimana harus mengingat, kami tidak dapat berpikir, tidak ada orang (pendahulu) yang mengajari kami", dan seolah-olah ini adalah

[15] William A. Smith, *Conscientizacao: Tujuan Pendidikan*..., 71-72.
[16] Ibid., 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesalahan nenek moyang mereka yang sejak dahulu tidak memberikan pencerahan.

Sikap menyalahkan nenek moyang adalah cara lain untuk menyalahkan diri sendiri. Dengan menuduh keluarga mereka sebagai keluarga yang tidak berbuat apa pun untuk mereka, mereka menentang akar-akar kultural dan konsekuensinya juga menentang diri mereka sendiri. Orang-orang tertindas dalam kesadaran naif ini berpendapat bahwa ketidakadilan dan kisah panjang tentang bagaimana mereka diekploitasi adalah sesuatu yang salah, akan tetapi indentifikasi mereka tentang keadaan ini masih belum bisa melampaui batas dari sekedar menyalahkan individu-individu. Mereka gagal dalam dalam melihat bahwa kekuatan-kekuatan besar dalam sebuah sistem yang memaksa kaum tertindas maupun kaum penindas.[17]

Masalah etika, kreatifitas, *need for achevement*, dalam kesadaran ini dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Menganalisis mengapa suatu masyarakan miskin, bodoh, bagi mereka karena disebabkan oleh kesalahan mereka itu sendiri. *Manpower development* dalam kesadaran ini adalah suatu yang diharapkan dapat mengubah dan pemicu suatu perubahan.

3) Kesadaran Kritis

Proses perubahan kesadaran kritis ini memiliki dua aspek, yaitu: *pertama*, penegasan diri dan penolakan diri menjadi “inang bagi benalu”. *Kedua*, berusaha secara sadar dan empiris untuk mengubah atau mengganti sistem yang menindas dengan sistem yang adil dan bisa mereka kuasai.

[17] William A. Smith, *Conscientizacao...*, 75-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesadaran kritis ini sangat berbeda dengan kesadaran naif, di mana orang-orang pada tingkat kesadaran ini menyalahkan individu mereka sendiri. Pada tingkat kesadaran kritis ini, individu-individu tidak menyalahkan dirinya sendiri, justru menunjukkan pemahaman yang benar atas dirinya sendiri dan sistem yang memaksa kaum tertindas dan penindas berkolusi (bekerjasama). Paulo Freire berkata bahwa:

> Kesadaran transitif (kritis) ditandai dengan penafsiran yang mendalam atas berbagai masalah, digantikannya penjelasan *magis* dengan penjelasan kausalitas; dengan mencoba penemuan-penemuan yang dihasilkan seseorang; dengan keterbukaan untuk melakukan revisi; dengan usaha untuk menghindari distorsi ketika memahami masalah dan menghindari konsep-konsep yang telah diterima sebelumnya ketika menganalisis masalah; dengan menolak untuk mengubah tanggungjawab; dengan menolak sikap pasif; dengan mengemukakan pendapat; dengan mengedepankan dialog dari pada polemik; dengan menerima pandangan baru tetapi bukan sekedar sekedar sifat kebaruannya dan dengan keinginan untuk tidak menolak pandangan kuno hanya karena sifat kekunoannya, yakni dengan menerima apa yang benar menurut pandangan kuno dan baru.[18]

Mereka yang dahulunya selalu menyalahkan diri sendiri sebagai sumber masalah mulai menyadari bahwa dengan menyalahkan diri sendiri tidak akan memberikan dampak atau perubahan apa-apa terhadap keberadaannya di dunia. Berkenaan dengan hal ini Freire menegaskan bahwa:

> Suatu kesadaran akan realitas semata-mata tidak tanpa pelibatan kritis di dalamnya tidak akan mengarah pada perubahan realitas obyektif itu, karena pada dasarnya dia bukanlah suatu kesadaran yang benar. Ini merupakan kesadaran subyektif tulen, yakni seseorang yang mengingkari realitas obyektif dan menciptakan pengganti yang palsu.[19]

Orang-orang tertindas yang bergerak ke arah kesadara kritis menyadari bahwa betapapun kerasnya usaha mereka, mereka tidak akan bisa menyerupai penindas dan oleh sebab itu mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk

---

[18] Firdaus M. Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial..., 50.
[19] Paulo Freire, *Pendidikan Kaum Tertindas*, terj. Tim Redaksi LP3ES, (Jakarta: LP3ES, 2011), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerupai penindas. Mereka fokus pada entitasnya sendiri, karena mereka ingin menjadi diri sendiri sebagai manusia yang unik dan jujur terhadap tradisi dan kebiasaan mereka sendiri. Orang-orang tertindas ini secara bertahap lebih merasa sebagai "subyek" dari pada "obyek".

Mereka terfokus pada sebuah sistem, mereka beranggapan bahwa peraturan, peristiwa, hubungan dan prosedur tertentu sekedar sebagai contoh dari ketidakadilan yang sistematis yang dilembagakan. Penindasan yang dilembagakan ini konsekuensinya tidak hanya terjadi sekali waktu di satu tempat dan menimpa satu orang saja, tetapi berlangsung dalam jangka waktu yang lama, menyebar luas dan menimpa banyak orang.

Kekejaman penindasan tersebut diperparah lagi dengan kebijakan, norma, prosedur dan hukum yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Kemampuan untuk mendefinisikan kesalahan sitem dan bukan sebagai kesalahan individu pada tataran kesadaran kritis ini menyebabkan kaum tertindas paham tentang bagaimana mereka harus bekerjasama untuk bekerja secara sistemik, dan bagaimana penindas melakukan cara kerja ini. Pandangan kaum tertindas terhadap kaum penindas menjadi lebih realistis, demikian juga terhadap diri mereka sendiri dan kelompoknya. Bagi kaum tertindas, berpikir pada tingkat kesadaran kritis berarti mampu secara jelas mendefinisikan kontradiksi-kontradiksi antara tindakan mereka sendiri dan tujuan pembebasannya.[20]

[20] William A. Smith, *Conscientizacao*..., 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindakan-tindakan kaum tertindas yang sudah memiliki kesadaran kritis bisa menuju ke dua arah, yakni aktualisasi diri dan mengubah sistem. Oleh sebab itu, mereka lebih mengandalkan sumber-sumber komunitas mereka sendiri dari pada harus bergantung pada pihak luar. Selain mengandalkan komunitas, mereka juga mengandalkan diri mereka sendiri yang mungki di mata penindas sebagai tindakan yang arogan. Upaya-upaya sadar ini dimaksudkan untuk menemukan informasi baru melalui proses membaca, berdiskusi dan melakukan perjalanan.

Refleksi dan aksi menjadi interdependen adalah sebuah lingkaran berpikir dan aksi konstan yang dirancang untuk meningkatkan akurasi pemahaman bagi kaum tertindas. Keberanian mengambil resiko menjadi lebih mewarnai sikap orang-orang tertindas. Mereka lebih berani melakukan perubahan dari pada tertindas oleh status quo, karena mereka telah menyadari bahwa sistem yang harus dipersalahkan, sehingga mereka mampu melakukan aksi dengan cara-cara yang dinilai salah oleh sistem.

Proses aktualisasi diri tersebut sebagian berupa penolakan terhadap penindasan, eleminasi nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang dipaksakan oleh penindas kepada kaum tertindas. Individu yang kritis tidak akan menyulut suatu konflik, tetapi bersiap diri untuk menghadapi konflik yang mungkin akan timbul. Dengan dimulainya proses aktualisasi diri pada setia individu maka lambat laun karakter pribadi penindas akan terusir dari dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya, dan kaum tertindas bebas untuk mendirikan sebuah sistem yang lebih baik dan adil daripada sistem yang ada sebelumnya.[21]

C. Konsep Gerakan Politik

Gerakan politik merupakan gerakan sosial kemasyarakatan dibidang politik, gerakan ini dapat berkisar di sekitar satu masalah ataupun dari serangkaian masalah atau dari serangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan publik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut.[22]

Sebagai kelompok masyarakat yang sedang menempuh proses pendidikan tertinggi, dengan sendirinya mahasiswa dipandang sebagai warga kaum intelektual. Di dalam golongan kaum cendekiawan itu sendiri, mahasiswa dipandang sebagai pihak yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi warga kaum intelektual sepenuhnya. Sehingga mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peran-peran sosial demi melaksanakan fungsi-fungsi kaum intelektual yang diantaranya mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi,

[21] Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial*..., hal. 51.
[22] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gerakan_politik. diakses jam 12.04am, 22 Juni 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan bagan-bagan nasional dan antar-bangsa, membina keberdayaan bersama, mempengaruhi kebudayaan sosial dan memainkan peran politik.[23]

> Pada umumnya Mahasiswa terdiri dari kalangan pemuda. Pemuda adalah kelompok muda yang memiliki potensi, semangat dan kemauan yang keras terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya. pemuda merupakan salah satu golongan masyarakat yang berpotensi untuk tampil di masyarakat, sehingga generasi muda erat hubungannya dengan perubahan sosial. Hal ini mengakibatkan pemuda lebih bebas bergerak melawan ketidakadilan dan tidak segan untuk bertindak keras. Dalam peruangannya, pemuda memiliki ciri-ciri yang khas yaitu bergerak dengan cara radikal dan selalu bertindak cepat.
>
> Pola berpikir kaum terpelajar atau mahasiswa yang jumlahnya relatif sedikit dibanding dengan umlah penduduk harus memikul tanggung jawab untuk memperbaiki masyarakat. Sekalipun mahasiswa berusia muda, tetapi berkembang dengan cepat mencapai kematangan, sebab selain mahasiswa mendapat pendidikan di perguruan tinggi, mahasiswa juga memperoleh pendidikan langsung dari masyarakat atas dasar kondisi dan situasi dimana mahasiswa tersebut tumbuh berkembang. Dalam kondisi masyarakat yang terjajah, mahasiswa mengalami kenyataan keras dan pahit. Mahasiswa melihat dengan mata kepala sendiri betapa massa rakyat menderita dalam keadaan sengsara dan tertindas. Suatu cambuk tepat mengenai hati sanubari generasi muda tatkala menyaksikan rakyat menerima nasibnya yang duka nestapa dan seolah-olah tidak tahu berbuat apa akibat sistem yang menimbulkan siksaan-siksaan. Kaum muda merasa peka terhadap keadaan, dan memahami duka dan sengsara rakyat.[24]

Oleh karena itu mahasiswa dipandang peka dan faham mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dan dapat bereaksi dan menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut dalam wujud yang kongkrit seperti gerakan mahasiswa yang bertujuan mengubah kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Gerakan mahasiswa baik yang berbentuk korektif maupun konfrontatif dapat dikategorikan sebagai gerakan politik nilai (*values political movement*), bukan gerakan politik kekuasaan (*power political movement*) seperti partai politik. Gerakan politik nilai (gerakan mahasiswa) berada dalam arena masyarakat sipil

---

[23] Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*, (Yogyakarta: INSIST, 1999) 86.

[24] Yosar Anwar, *Angkatan 66: Sebuah Catatan Harian Mahasiswa*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1981), 230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*civil society*), sedangkan gerakan politik kekuasaan (partai politik) berada dalam arena masyarakat politik (*political society*).

Karena kegiatan mahasiswa sebagai gerakan moral yang berfungsi utama selaku pencetus kesadaran dan usaha untuk mengadakan perubahan, maka mahasiswa memerlukan kerjasama pihak lain untuk menyelesaikan secara tuntas. Maka dengan sendirinya bantuan dan kerjasama yang meningkatkan efektifitas gerakan yang diselenggarakan oleh organisasi tersebut, sedikit banyak mempengaruhi kemurnian identitas mereka.[25] Gerakan mahasiswa dengan segala kelebihan dan kekurangannya memang diakui bahwa tidak semua gerakan mahasiswa hasilnya seperti yang diharapkan.

Tidak semua aspirasi dari kelompok intelektual muda tersebut memperoleh jawaban yang memuaskan dari pemerintah, akan tetapi peranan mahasiswa dalam perubahan politik di masyarakat juga diperlukan. Gerakan mahasiswa ini bertemakan realisasi demokratisasi dan keadilan sosial, serta menekankan pada nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial secara luas dan menyeluruh. Seperti gerakan mahasiswa turun jalan, harus dengan teriakan-teriakan retoris, harus mampu menjatuhkan sebuah rezim tirani, harus bersifat masif dan lain sebagainya. Inti gerakan mahasiswa harus paham betul terhadap apa yang diperjuangkan sesuai tuntutan perannya secara sosial, politik dan keilmuan atau intelektualitas.

[25] Sanit, Pergolakan Melawan Kekuasaan, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran gerakan mahasiswa, tidak bisa terlepas dari aktivitas politik mahasiswa yang mengharuskan mempunyai satu ideologi politik yang kuat. Terdapat tiga jenis gerakan mahasiswa, yaitu:

a. Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan senat pada perguruan tinggi yang memakai tradisi ideologi demokrasi liberal dengan visi merubah kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat.
b. Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh kaum muda yang mempunyai visi strategi atau taktik perjuangan melalui gerakan ekstra parlementer dengan karakter gerakan marxis komunis.
c. Gerakan mahasiswa yang dimotori oleh jaringan demokrasi gerakan mahasiswa radikal yang berideologi sosialis non marxis yang mempunyai visi mengganti pemerintahan dengan kepemimpinan alternatif.

Gerakan mahasiswa ini pada dasarnya ada yang merupakan gerakan mahasiswa yang benar-benar independent artinya murni memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik dari kelompok tertentu dan gerakan mahasiswa yang mempunyai patron, artinya perjuangan gerakan mahasiswa mempunyai kepentingan politik tertentu sesuai dengan tujuan patron masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Etnis Tionghoa Dalam Dinamika Politik di Indonesia

1. Identitas Etnis dan Nasional

Golongan Tionghoa di Hindia Belanda (*Dutch East Indies*) terpisah dari dua kelompok ras lainnya, yakni Belanda dan pribumi Indonesia. Namun secara budaya, masyarakat Tionghoa belum pernah secara sadar menampilkan identitas mereka. Ini berlangsung hingga abad ke-19 pada saat kebangkitan nasionalisme budaya Tionghoa dalam bahasa melayu peranakan, yang kemudian lebih jauh dimanifestasikan dalam kemunculan THHK[26] di Jakarta dalam peralihan masuk abad ke-20.

Bangkitnya nasionalisme budaya Tionghoa sangat erat kaitannya dengan kondisi dalam negeri Hindia Belanda di samping karena menyebarnya nasionalisme Tionghoa yang berasal dari Tiongkok. Masyarakat Tionghoa Hindia Belanda yang terbuka terhadap pendidikan Barat (Belanda) masih terus menerima status hukum dan sosial yang inferior di Hindia Belanda. Mereka membenci kondisi ini dan sangat keberatan dengan kebijakan diskriminasi Belanda terhadap masyarakat Tionghoa. Selain itu, para tokoh masyarakat Tionghoa tidak terlalu senang dengan adat sosial mereka yang mereka anggap terbelakang dan berbahaya. Dengan tujuan mengubah adat mereka sendiri dan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Para pemimpin masyarakat Tionghoa Hindia Belanda mendirikan THHK untuk

[26] THHK adalah asosiasi Tionghoa, organisasi pan-Tionghoa pertama di Jawa, dibentuk di Jakarta tahun 1960. Pada awalnya terliibat dalam bidang sosial, keagamaan, dan pembaruan pendidikan Tionghoa, kemudian secara bertahap menjadi sebuah organisasi pendidikan dengan cabang-cabangnya di seluruh Indonesia. Asosiasi ini lenyap setelah tahun 1965. Ed., Leo Suryadinata *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempromosikan konfusianisme, dan sekolah Tionghoa dengan kurikulum modern. Budaya Tionghoa telah memberikan semacam identitas baru bagi masyarakat Tionghoa di Hindia Belanda dan mereka mulai berorientasi ulang terhadap Tiongkok.[27]

Kehadiran minoritas Tionghoa ini dirasakan di Indonesia, karena perdagangan dan aktivitas ekonomi lainnya, keterkaitannya dengan apa yang dilihat sebagai budaya asing, dan hubungan etnisnya dengan Tiongkok. Tidak ada keraguan bahwa minoritas Tionghoa memiliki pengaruh yang melampaui kekuatan jumlah mereka, walaupun mereka belum mengendalikan ekonomi negara.[28]

Setelah kemerdekaan Indonesia, ada sejumlah kalangan pluralis masyarakat Tionghoa yang mengidentifikasikan diri mereka dengan Tiongkok, baik secara politik maupun budaya. Akan tetapi sejumlah besar masayarakat Tionghoa peranakan mengidentifikasikan dirinya secara politik dengan Indonesia, walaupun secara budaya mereka ingin tetap sebagai warga Tionghoa Indonesia. Kalangan Tionghoa ini awalnya bergabung dengan Persatuan Tionghoa (berdiri di tahun 1948) yang kemudian (tahun 1950) mengubah namanya menjadi PDTI (Partai Demokrat Tionghoa Indonesia). Thio Thiam Tjong[29], sebagai mantan pemimpin CHH yang juga Presiden Persatuan

---

[27] Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 3.
[28] Ibid., 2.
[29] Thio Thiam Tjong (1896-1969) lahir di Semarang, belajar di Delft Technical College di Belanda. Tahun 1928 ia bertugas sebagai anggota dewan pusat CHH. Dari tahun 1930 hingga 1934, ia terpilih menjadi pimpinan Siang Bu. Setelah diinternir selama pendudukan Jepang di Indonesia, ia menjadi penasihat pribadi van Mook, Letnan Jendral Gubernur Hindia Belanda. Setelah Jepang menyerah tahun 1948, Thio mendirikan Persatuan Tionghoa yang kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tionghoa, menegaskan bahwasannya walaupun masyarakat Tionghoa Indonesia memilih kebangsaan Indonesia, mereka dapat memelihara identitas budaya mereka. Namun, ia menentang berbagai jens ideologi yang ekstrim, termasuk militerisme dan kediktatoran proletariat. Khoe Woen Sioe[30] (seorang jurnalis peranakan yang merupakan sekertaris Persatuan Tinghoa), menekankan betapa pentingnya Tionghoa lokal melibatkan diri mereka dalam politik karena ini adalah sebuah senjata untuk mempertahankan kepentingan Tionghoa sebagai kelompok minoritas.

Ketua Baperki adalah Siauw Giok Tjhan yang pernah menjadi Direktur Harian Rakjat. Siauw menegaskan bahwa warga negara Indonesia keturunan Tionghoa sudah menjadi warga negara Indonesia, oleh karena itu mereka tidak perlu mengubah nama Tionghoa mereka menjadi nama "Indonesia" atau mengawini penduduk pribumi Indonesia.

Selain itu, mereka tidak harus mengubah agamanya menjadi agama lainnya yang dianggap sebagai "Indonesia". Dengan kata lain, orang Tionghoa Indonesia peranakan harus diakui sebagai suku di Indonesia. Siauw tidak setuju pembauran orang-orang Tionghoa Indonesia peranakan yang dipaksakan ke dalam masyarakat pribumi; walaupun ia juga tidak setuju adanya diskriminasi

---

berubah menjadi PDTI. Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 147-148.

[30] Khoe Woen Sioe (1905-1966) lahir di Jakarta, belajar di dua sekolah Belanda. Mulanya ia bekerja di *Sin Po*, kemudian dengan *Keng Po*, dan akhirnya mengambil alih jabatan direktur dari surat kbar yang disebut belakangan. Pada tahun 1946 ia menjadi presiden Sin Ming Hui. Pada tahun yang sama ia menerbitkan *Star Weekly*, sebuah jurnal peranakan yang berpengaurh. Kemudian ia menghidupkan kembali *Keng Po*. Ia aktif dalam pembentukan Persatuan Tionghoa dan menjadi editor jurnal *Sinar*. Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 151-152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rasial. Adanya konflik rasial dan etnis di Indonesia, dia mengusulkan jalan keluarnya melalui sebuah revolusi sosialis bukan dengan proses pembauran.[31]

Kwik Kian Gie[32], seorang ekonom berpendapat bahwa pembauran telah dicapai. Bagaimanapun juga ia menegaskan bahwa berlanjutnya pemisahan antara pribumi dengan non pribumi di Indonesia pada dasarnya adalah ciptaan sejumlah pemimpin pembauran. Ia mengakui bahwasannya ketegangan antara pribumi dengan non pribumi memang ada dan terjadi di setiap masyarakat. Ia menegaskan bahwa masalahnya harus dilihat dalam sebuah pandangan yang memadai. Kenyataannya, idenya mengenai pembauran sangatlah dekat dengan integrasi.[33]

Seperti halnya Persatuan Tionghoa, golongan ini berpendapat bahwa mereka menerima kewarganegaraan Indonesia tetapi tidak berarti membuang kebangsaan sendiri. Menurutnya, negara yang demokratis dan modern mengizinkan golongan-golongan kecil untuk memelihara serta mempertahankan kebudayaan dan agama sendiri.[34] Mereka juga menginginkan duduk di kursi anggota dewan dan memiliki kedudukan dalam pemerintah.

---

[31] Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis*, 147.

[32] Kwik Kian Gie dilahirkn di Juwana, Jawa Tengah, pada 1935. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi UI, Jakarta dan memperoleh gelar Drs. Dari sebuah universitas di Rotterdam, Belanda pada 1963. Pada 1987 ia mendirikan Institut Bisnis Indonesia. Kwik juga aktif dalam politik, dikenal sebagai pembicara yang efektif, ia bergabung dengan PDI dan ikut serta dalam pemilihan anggota DPR tahun 1987 tapi gagal. Antara tahun 1987 dan 1992 ia terpilih menjadi anggota panitia kerja MPR mewakili PDI. Ia bertugas pula sebagai ketua Badan Pengembangan dan Penelitian PDI-P. Pemikiran Leo Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900-2002*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), 204-205.

[33] Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis*, 147.

[34] Ibid., 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar dapat membela serta memperjuangkan kepentingan golongan yang terutama yakni kepentingan ekonomi serta sosial.[35]

Persatuan Tionghoa juga mengemukakan idenya tentang demokrasi. Bahwasannya demokrasi yang sejati dalam arti yang sesungguhnya berarti:

> One for all dan all for one, yaitu: satu buat semua, semua buat satu. Golongan-golongan kecil harus tunduk terhadap putusan-putusan golongan-golongan besar dan harus bersedia apabila perlu, buat korbankan jiwa dan raga buat umum.
>
> Sebaliknya golongan-golongan besar yang mempunyai suara banyak dan dapat menguasai lain-lain golongan, harus memperhatikan kepentingan golongan-golongan kecil dengan menjamin baik hidup suburnya maupun berkembangnya golongan-golongan itu secara bebas.[36]

Mereka berikhtiar untuk memperbaiki baik keadaan sosial rakyat jelata, mempertinggi penghidupan kaum buruh, karena hanya dengan jalan ini keadaan ekonomi masyarakat dapat dimakmurkan.

2. Status Ekonomi Tionghoa Indonesia

Masalah Tionghoa Indonesia tidak terbatas pada identitas nasional, budaya dan politik. Status ekonomi minoritas Tionghoa juga merupakan elemen penting di dalam masalah Tionghoa. Ramainya interaksi perdagangan di daerah pesisir menyebabkan banyak sekali orang-orang yang juga merasa perlu keluar berlayar untuk berdagang. Karena pelayaran sangat tergantung pada angin musim, maka setiap tahunnya para pedagang akan bermukim di wilayah-wilayah yang mereka singgahi. Demikian seterusnya ada pedagang

[35] Suryadinata, *Pemikiran Politik Etnis*, 150.
[36] Ibid., 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang memutuskan untuk menetap dan menikahi wanita setempat, ada pula pedagang yang pulang.[37]

Pada dasawarsa 1930-an orang-orang etnis Tionghoa sudah mendominasi perdagangan, dan mereka mendirikan dua pabrik pegolahan karet terbesar di Palembang. Yang satu adalah Hok Tong, milik seorang etnis Tionghoa yang tinggal di Singapura, dan yang satunya lagi adalah Kiang Gwan, sebuah perusahaan dagang dari kelompok Oei Tong Ham, yang merupakan kelompok usaha etnis Tionghoa terbesar di Asia Tenggara pada zaman sebelum Perang Dunia II. Kiang Gwan mempunyai cabang di Bombay, Kalkuta, Karachi, Shanghai, Hong Kong, Amoy, Singapura, dan London[38].

Pada waktu etnis Tionghoa datang ke Indonesia, kehidupan penduduk pribumi tergantung dari hasil pertanian. Penduduk pribumi tidak menyukai usaha perdagangan. Oleh karena itu etnis Tionghoa menempati kesempatan ini, sehingga dengan modal tekun, teliti dan cermat, akhirnya dapat menguasai sektor perdagangan di semua lapisan masyarakat. Sejak itu pola kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia cenderung sepenuhnya kepada usaha ekonomi, khusus dalam perdagangan dan usaha industri. Sesuai dengan tujuan semula mereka datang karena mereka tertarik akan kehidupan yang menyenangkan itu.

Kegiatan ekonomi etnis Tionghoa semakin menonjol pada periode tahun 1957 sampai 1958. Keberhasilan usaha mereka mengambil alih

---

[37] Kawasan pesisir memang kawasan yang punya pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi. Coba lihat kejayaan Kerajaan Malaka yang menjadi representasi kejayaan keluasan pengaruh ekonomi kala itu. Selengkapnya lihat Hussin Mutalib, *Islam dan Etnisitas Prespektif Politik Melayu*, (Jakarta:LP3ES, 1996), hlm. 16-17.

[38] Yoshihara dalam Irwan Alexander, *Jejak-Jejak Krisis di Asia Ekonomi Politik Industrialisasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi, walaupun kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak menguntungkan mereka, apalagi setalah peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.[39] Mereka masih mampu bekerja dalam waktu yang panjang dan jarang beristirahat kecuali untuk hari besar mereka. Senantiasa menghasilkan keuntungan, dan sudah menjadi kebiasaan sekaligus kesenangan mereka dengan semangat yang mengarah pada kemakmuran.

Bahkan menurut catatan di Bursa Efek setelah krisis Moneter 1997-1998, kekuatan ekonomi konglomerat Tionghoa rupanya tidak serta merta meredup. Hingga saat ini tampaknya penguasaan bisnis konglomerat keturunan etnis China Tionghoa masih kuat.[40]

E. Kondisi Pemerintahan Era Demokrasi Terpimpin

Pasca pemilu 1955 yang dikenal sebagai pemilu yang paling demokratis, paling aman dan paling jujur, ternyata tidak melahirkan keadaan yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan oleh semua orang. Tidak ada kemajuan ekonomi maupun keamanan serta tidak adanya kestabilan politik. Pada waktu itu budaya politik yang berkembang dalam demokrasi liberal yang mana penuh dengan konflik politik hingga pertarungan ideologis, sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi perkembangan bangsa dan negara. Negara hukum yang demokratis yang awalnya ada dalam Undang-Undang Dasar RIS, kemudian ketika kembali ke NKRI tetap dipertahankan, tidak memberikan kemauan dalam kehidupan politik.

[39] http://www.budaya-Tionghoa.net (Diakses pada 24 Juli 2016, pukul 09.16)
[40]http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2014/10/04/etnis-china-Tionghoa-masih-nomor-satu-kuasai-bisnis-dan-ekonomi-indonesia-595596.html (Diakses pada 24 Juli 2016, pukul 08.56)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi kenyataannya demokrasi liberal yang diharapkan telah menimbulkan sikap yang saling menjegal, perdebatan kosong yang tidak menghasilkan apa-apa sehingga pembangunan tak kunjung terlaksana. Hingga pergantian kabinetpun kerap kali terjadi. Gusarnya Presiden Sukarno terhadap kinerja kabinet dan tingkah laku partai-partai sehingga akhirnya dikeluarkan Konsepsi Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Didalam konsepsi tersebut merupakan keinginan Presiden Sukarno untuk menyelesaikan semua pertengkaran politik serta pertarungan ideologis yang terjadi. Adapun isi Konsepsi Presiden tersebut antara lain,

> 1. Demokrasi Terpimpin, karena melihat krisis politik yang dilahirkan oleh demokrasi parlementer dianggap demokrasi liberal ini tidak sesuai dengan kepribadian manusia.
> 2. Agar dibentuk kabinet yang didukung oleh semua kekuatan nasional terutama ranking atas hasil pemilihan umum 1955, yaitu PNI, MASYUMI, NU, PKI, dan partai-patai lainnya yang disebut kabinet gotong royong atau oleh Presiden Sukarno uga dikenal sebagai kabinet kaki empat, yaitu kabinet yang ditopang oleh PNI, MASYUMI, NU serta PKI.
> 3. Pembentukan Dewan Nasional yang diisi oleh golongan fungsional dalam masyarakat dengan tugas memberi nasehat kepada kabinet baik diminta ataupun tidak diminta.[41]

Pada konsepsi tersebut terlihat jelas keinginan Presiden Sukarno untuk membentuk suatu pemerintahan nasional yang mengikutsertakan semua partai termasuk PKI. Tetapi hal tersebut justru yang menyebabkan konsepsi ini mendapat tentangan dari beberapa partai politik saat sidang konstituante. Sehingga tujuan utama konstituante yang merupakan lembaga yang dipilih rakyat dalam melahirkan konstitusi nasional tidak dapat diwujudkan. Mereka bersidang guna merumuskan Undang-undang Dasar yang baru guna mengganti Undang-

[41] Nazwir Abu Nain, *Angkatan 66; Dalam Lintasan Sejarah perjuangan Bangsa*, (Jakarta: CIPRO MEDIA, 2011), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang 1950 yang bersifat sementara. Namun sayang selama tiga tahun sidang Konstituante tidak juga bisa menyelesaikan tugas sebagai mestinya. Mereka terjebak pada apa yang sebaiknya dijadikan dasar ideologi negara. Pada saat itu Konstituante terbagi menjadi tiga kubu. Pertama kubu pendukung Pancasila sebagai ideologi negara, kedua kubu Islam yang mencita-citakan Islam sebagai Dasar Negara, dan terakhir kubu Sosio-Ekonomi.[42]

Melihat situasi yang demikian Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959, dengan dukungan para loyalisnya seperti Khairul Saleh, Subandrio, dan Leimena.[43] Presiden Sukarno mengeluarkan sebuah Dekrit yang isinya. Pertama Pembubaran Konstituante, kedua berlakunya kembali UUD 1945, dan ketiga pembentukan MPRS dan DPAS. Presiden Sukarno beralasan dengan lahirnya Dekrit ini, maka Bangsa ini telah menemukan kembali Revolusinya, "*Rediscovery of Our Revolution*".[44] Inisiatif politik tersebut dilakukan oleh Presiden Sukarno dalam rangka pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.

Karena bagi Sukarno sejak disetujuinya KMB (Konferensi Meja Bundar) dan berlakunya UUD Sementara 1950, serta berlakunya sistem Parlementer. Indonesia telah melenceng dari relnya revolusi. Sistem parlementer faktanya memang sangat rentan akan ancaman instabilitas pemerintahan. Kabinet dapat jatuh bangun setiap waktu, karena tidak mendapat dukungan dari parlemen. Dengan keluarnya dekrit ini, harapan Sukarno adalah terciptanya pemerintahan yang stabil. Karena stabilitas merupakan syarat utama berjalannya sebuah

---

[42] Dzulkifriddin, *Muhammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*, (Bandung: Mizan, 2010), 113

[43]Cindy Adams, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat,* (Yogyakarta : Media Pressindo & Yayasan Bung Karno, 2014), 340

[44] Siswo, *Panca Azimat Revolusi*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

revolusi. Bagi Sukarno revolusi tidak dapat dijalankan jika Pemerintah setiap rabu wage atau sabtu pahing dijatuhkan oleh oposisi.[45]

Maka dengan adanya Dekrit ini, Presiden Sukarno menjalankan konsepsi politiknya yang bernama Demokrasi Terpimpin, guna menjamin stabilnya pemerintah, serta lancarnya perjalanan roda revolusi. Serta dengan Dekrit ini pula, Presiden Sukarno membentuk DPR baru guna menggantikan DPR lama yang dianggapnya tidak revolusioner, karena tidak dpat melaksanakan tugasnya dalam membentuk dasar negara baru. DPR baru yang dibentuk Sukarni ini dinamakannya DPR Gotong-Royong (DPR-GR) yang mayoritas anggotanya para Mahasiswa.

Jika dilihat secara sekilas memang konsepsi Demokrasi Terpimpin dari Sukarno ini terlihat baik dengan menjamin stabilnya pemerintahan. Namun jika ditelisik secara lebih dalam, konsepsi politik Sukarno ini memperlihatkan sebuah blunder politik dan kediktatoran seorang pemimpin. Blunder politik yang dilakukan Sukarno dengan mengeluarkan dekrit ini dan konsepsi demokrasi terpimpinnya adalah, pembubaran konstituante.

Konstituante dengan anggota yang berjumlah 544 orang, yang dibentuk sebagai hasil pemilu 1955 tersebut. Telah bersidang selama 3,5 tahun guna merumuskan dasar negara. Selama bersidang memang terjadi perdebatan alot diantara anggota konstituante. Meskipun demikian, selama 3,5 tahun bersidang tersebut konstituante sudah 90% menyelesaikan tugasnya dalam merumuskan dasar negara baru. Bahkan menurut Adnan Buyung Nasution Rumusan Undang-

[45] Siswo, *Panca Azimat Revolusi*,, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Dasar yang dibentuk Konstituante saat itu juga sudah merumuskan 24 pokok HAM.[46]

Menurut Adnan Buyung Nasution juga, ketika diwawancara majalah Tempo pada 2011 dalam investigasi Tempo untuk pembuatan buku Seri Buku Tempo tentang M. Natsir. Menurut Buyung pihak yang bertikai dalam konstituante tersebut sudah ada yang bersedia "mengalah". Yakni kelompok yang digawangi M. Natsir dengan Masyuminya, yang tidak lagi memaksakan Islam Sebagai Dasar Negara. Menurut Buyung Natsir dan Masyumi sadar bahwa Dasar Negara Islam tidak dapat dipaksakan, dan mereka bersedia untuk berdiskusi lagi. Namun karena politisasi tentara melalui Ikatan Pelajar Kemerdekaan Indonesia (IPKI), yang mendukung PNI dan PKI. Mereka memboikot sidang Konstituante, yang membuat sidang konstituante dibuka kembalipun tidak akan memenuhi kuorum. Dan yang pasti ketergesa-gesaan Sukarno untuk mengeluarkan dekrit yang membubarkan konstituante. Maka gagal lah rumusan Undang-undang Dasar hasil sidang konstituante yang sudah hampir selesao tersebut untuk disahkan.[47]

Selain menyiratkan sebuah blunder politik, Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 dengan konsepsi Demokrasi Terpimpinnya melambangkan kediktatoran. Kebebasan Politik dan kebebasan peradilan tidak lagi ada. Sukarno dengan dukungan militer, menjadi diktator. Semua lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan MA) berada dibawah kekuasaan Presiden. Seluruh kepala staf militer, baik Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara merangkap

[46] Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, (Jakarta : Kompas, 2011), 13
[47] Seri Buku Tempo, *Natsir Politik Santun diantara Dua Rezim*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia 2016), 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jabatan sebagai menteri negara mewakili angkatan mereka masing-masing serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.[48]

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin pada kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi. Presiden Sukarno menjalin hubungan yang lebih erat dengan Tentara Nasional Indonesia Khususnya Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia untuk dijadikan elemen pendukung Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut telah terbukti pada tanggal 9 Juli 1959 Presiden Sukarno mengangkat 43 menteri, 11 diantaranya diberikan pada militer dan mengangkat 45 anggota DPAS yang dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Dan juga dibentuk sebuah lembaga baru yang bertanggungjawab atas penyusunan strategi serta tujuan pembangunan nasional, yakni Badan Perencanaan Nasional (BPN) yang diketuai oleh Muhammad Yamin.[49] Terlihat jelas bahwasannya Presiden Sukarno berusaha mendominasi setiap nafas politik di Indonesia dengan pidato-pidato kepresidenan dan pernyataan publiknya yang memainkan peran utama dalam pembentukan simbol serta paham ideologis. Seperti halnya pidato yang berjudul "penemuan kembali revolusi kita" yang mana disampaikan pada tanggal 5 Juli 1959.[50]

> Bukan sadja di Indonesia orang berpengalaman begitu, tetapi djuga pemimpin-pemimpin di negara-negara lain mulai sadar akan hal itu. Demokrasi Barat di beberapa negara Asia sekarang sudah dinjatakan mengalami kegagalan. Indonesia hendak menjelesaikan revolusinja jang multikompleks itu dengan sistemnja Demokrasi Terpimpin, demokrasi Indonesia sendiri. Segala penjelewengan, segala langkah-langkah, segala salah-wissel dari masa sesudah 1950, kita koreksi dengan Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi 5 Djuli 1959, ang mungkin memungkinkan djuga Demokrasi Terpimpin berdjalan.[51]

---

[48] Nasution, *Demokrasi Konstitusional*, 72.
[49] Maxwell, *Pergulatan Intelektual*, 69.
[50] Siswo, *Panca Azimat Revolusi, jilid II*, 17.
[51] Ibid, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pidato tersebut bisa diketahui bahwasannya Presiden Sukarno merusaha melakukan indoktrinasi dan memaksakan sistem ideologi yang dikenal dengan Manipol USDEK. Indontrinasi Manipol USDEK berusaha dipaksakan sebagai ideologi pada instansi pemerintah, instansi pendidikan ormas, parpol dan pers. Pada parpol dan ormas yang enggak merubah anggaran dasarnya dengan mencantumkan Manipol USDEK maka akan berakhir dengan pembubaran. Hal tersebut terjadi pada partai masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia). Media pers juga harus berdasarkan Manipol USDEK dan harus menjadi alat perjuangan untuk penyelesaian revolusi, apabila ada yang melanggar maka akan dibredel serta dicabut Surat Izin Terbitnya. Lain halnya dalam lingkup Universitas, Manipol USDEK tidak dapat menembus tembok universitas karena disana merupakan tempat berkumpulnya para mahasiswa yang sadar politik. Di lingkup militer, ideologi Manipol USDEK disambut dengan hangat tetapi ditafsirkan sebagai ideologi yang anti liberal dan anti komunis.[52]

Jika merunut pada Demokrasi Terpimpin yang seharusnya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ternyata seluruhnya belum bisa sesuai. Pada tanggal 22 Juli 1959 berdasarkan Penetapan Presiden, Presiden Sukarno membentuk MPRS dengan batasan tugas serta anggota-anggota yang ditunjuk dan diangkat sendiri oleh presiden. Adapun ketetapan-ketetapan yang diambil oleh MPRS tidak bisa lepas dari pengaruh kekuasaan Presiden Sukarno, seperti pada sidang MPRS tahun 1960 yang mana menetapkan Manipol USDEK menjadi Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dan pada sidang umum MPRS tahun 1963 yang membuat

[52] Herbert Feith, *Soekarno-Militer Dalam Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 1995), 81-86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketetapan bahwasannya “mengangkat Dr. Ir. H. Sukarno menjadi Presiden seumur hidup”. Kebijakan tersebut diambil oleh Presiden Sukarno guna sebagai solusi alternatif hingga MPR serta GBHN sesuai dengan UUD 1945, yakni sampai MPR hasil pemilu terbentuk. Tetapi hal tersebut dimanfaatkan oleh Presiden Sukarno untuk memperbesar dan memperkuat kekuasaannya.

Tanda-tanda kekuasaan absolut pada Presiden Sukarno mulai tampak. DPR yang tidak setuju dengan APBN yang diajukan pemerintah dibubarkan dan diganti dengan DPR Gotong Royong (DPR-GR) dengan komposisi anggota sesuai dengan kehendak presiden, terdiri dari 44 anggota dari PNI, 36 anggota dari NU, 30 anggota dari PKI, 118 anggota dari golongan fungsional non-ABRI, dan 35 anggota dari ABRI.

> Dengan jalan yang jauh kurang sempurna, kita mencoba membuktikan, bahwa faham Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme itu dalam negeri jajahan pada beberapa bagian menutupi satu sama lain. Dengan jalan yang jauh kurang sempurna kita menunjukkan teladan pemimpin-pemimpin di lain negeri. Tetapi kita yakin, bahwa kita dengan terang-benderang menunjukkan kemauan kita menjadi satu. Kita yakin, bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia semuanya insyaf, bahwa Persatuanlah yang membawa kita ke arah ke-Besaran dan ke-Merdekaan. Dan kita yakin pula, bahwa, walaupun fikiran kita itu tidak mencocoki semua kemauan dari masing-masing fihak, ia menunjukkan bahwa Persatuan itu bisa tercapai. Sekarang tinggal menetapkan sahaja organisasinya, bagaimana Persatuan itu bisa berdiri; tinggal mencari organisatornya sahaja, yang menjadi Mahatma Persatuan itu. Apakah Ibu-Indonesia, yang mempunyai Putera-putera sebagai Oemar Said Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo dan Semaun, – apakah Ibu-Indonesia itu tak mempunyai pula Putera yang bisa menjadi Kampiun Persatuan itu?
>
> Kita harus bisa menerima; tetapi kita juga harus bisa memberi. Inilah rahasianya Persatuan itu. Persatuan tak bisa terjadi, kalau masing-masing fihak tak mau memberi sedikit-sedikit pula.
>
> Dan jikalau kita semua insyaf, bahwa kekuatan hidup itu letaknya tidak dalam menerima, tetapi dalam memberi; jikalau kita semua insyaf, bahwa dalam percerai-beraian itu letaknya benih perbudakan kita; jikalau kita semua insyaf, bahwa permusuhan itulah yang menjadi asal kita punya “via dolorosa” ; jikalau kita insyaf, bahwa Rokh Rakyat Kita masih penuh kekuatan untuk menjunjung diri menuju Sinar yang Satu yang berada ditengah-tengah kegelapan-gumpita yang mengelilingi kita ini, – maka pastilah Persatuan itu terjadi, dan pastilah Sinar itu tercapai juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab Sinar itu dekat![53]

Sebenarnya gagasan Nasakom sudah sejak tahun 1926 demi tercapainya tujuan peruangan kemerdekaan. Saat Spresiden Sukarno masih muda, dia menjabat sebagai ketua *Algemene Studieclub* di bandung dan telah menggagas Persatuan Indonesia dengan membentuk Komite Persatuan Indonesia yang mana merupakan kerjasama dengan Sarekat Islam, Muhammadiyah, JIB (*Jong Islamieten Bond),* Pasundan, Persatuan Minahasa, Sarekat Ambon dan Sarekat Madura. Usaha tersebut dilanjutkan pada 4 Juli 1927 oleh Sukarno yakni dengan membentuk PNI, dimana pada konggres kedua, 18-20 Mei 1929 mengambil keputusan bahwasannya ajaran Sosialisme, Komunisme dan agama (Islam) untuk memperkuat nasionalisme.[54] Pada akhir 1960-an Presiden Sukarno mengangkat gagasan bahwa PKI akan dimasukkan dalam kabinet yang sesuai dengan ajaran Nasakom, yakni prinsip kerja sama antara kelompok nasionalis, agama dan komunis yang dianggapnya penting untuk mencapai persatuan nasional.[55]

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dengan ditambah semakin tegangnya kekacauan politik yang terjadi dan salah urus ekonomi. Popularitas Sukarno menjadi semakin menurun dan kemudian berpuncak pada tragedi Gestok pada 1965 dan Demonstrasi Mahasiswa pada awal 1966 yang berujung pada kejatuhannya.

---

[53] Ir. Sukarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, jilid I cet. 3 (Yogyakarta: Panitya Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, 2015), 23-24.
[54] A.K Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1984), 62.
[55] John Maxwell, *Pergulatan Intelektual*, 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id